

LEMBAR KERJA ELEKTRONIK EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM

SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI CURUP

tahun : 2021

PENILAIAN	Bobot	Jawaban	Nilai	%	Keterangan
A. PROSES (60)	60		59,37	98,95%	
I. MANAJEMEN PERUBAHAN	8		8	100,00%	
1 Tim Kerja (1)	1		1	100,00%	
Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas ?	YA		1		Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas. Dokumen Berupa : 1. Daftar Riwayat Hidup 2. Dokumen Rapat Pembentukan Tim kerja Pembangunan Zona Integritas 2021 3. Laporan Pembentukan Tim kerja Pembangunan Zona Integritas 2021 4. Dokumen Rapat Pengesahan Tim kerja Pembangunan Zona Integritas 2021 5. Laporan Pengesahan Tim kerja Pembangunan Zona Integritas 2021 6. SK Tim kerja Pembangunan Zona Integritas 2021
Apakah penentuan anggota Tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mechanisme yang jelas ?	A		1		Penentuan anggota Tim selain pimpinan telah dipilih melalui prosedur/mechanisme yang jelas. Dokumen berupa : 1. Daftar Riwayat Hidup 2. Dokumen Prosedur Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas 2021 3. Dokumen Pertimbangan Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas 2021 4. Berita Acara Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas 2021
2 Rencana Pembangunan Zona Integritas (2)	2		2	100,00%	
Apakah ada dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM ?	YA		1		Terdapat rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Dokumen berupa : 1. Rapat penyusunan rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. 2. Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. 3. Laporan penyusunan rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM?	A		1		Terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM. Dokumen berupa : 1. Rapat penyusunan target prioritas pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. 2. Dokumen target prioritas pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. 3. Laporan penetapan target prioritas pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM ?	A		1		Terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM. Dokumen berupa : 1. Rapat sosialisasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. 2. Dokumentasi mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. 3. Laporan sosialisasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
3 WBK/WBBM (2)	2		2	100,00%	

<p>a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana ?</p>	A	1	<p>Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Dokumen berupa Laporan Hasil Kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK WBBM. TINDAK LANJUT HASIL PERBAIKAN : 1. Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan ZI Area I 2. Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan ZI Area II 3. Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan ZI Area III 4. Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan ZI Area IV 5. Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan ZI Area V 6. Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan ZI Area VI Dokumen dapat diunduh di : https://drive.google.com/drive/folders/1gVfZ8G6_2Tp1BLf8zGGgXk1W5yXZy_ga?usp=sharing</p>
<p>b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas</p>	A	1	<p>Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas setiap bulan. Dokumen berupa : 1. Rapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas bulan Februari 2021 2. Laporan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas bulan Februari 2021</p>
<p>c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti ?</p>	A	1	<p>Sudah dilakukan tindaklanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas setiap bulan. Dokumen berupa : 1. Rapat indaklanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas bulan Februari 2021 2. Laporan indaklanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas bulan Februari 2021</p>
<p>4 Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja (3)</p>	3	3	100,00%
<p>a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM ?</p>	YA	1	<p>Pimpinan pada Pengadilan Negeri Curup telah memberi teladan nyata, data pendukung : DOKUMENTASI KEGIATAN KERJASAMA, PRESS RELEASE, ABSENSI PIMPINAN SATKER DAN PEJABAT STRUKTURAL, DAN FOTO-FOTO/DOKUMENTASI PIMPINAN SATKER/PEJABAT STUKTURAL SEBAGAI PEMBINA APEL agen perubahan sudah ditetapkan, data pendukung : SK DAN PEDOMAN AGEN PERUBAHAN, DOKUMEN RAPAT PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN, DOKUMEN LAPORAN PELAKSANAAN PENETAPAN AGEN PERUBAHAN, RIWAYAT HIDUP DAN REKAM JEJAK AGEN PERUBAHAN, RAPAT PENGUMUMAN AGEN PERUBAHAN TERPILIH TAHUN 2021 DAN DOKUMEN RENCANA KERJA AGEN PERUBAHAN TERPILIH</p>
<p>b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan ?</p>	A	1	

	Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi?	A	1		dikarenan file e-doc melebihi batas maksimal upload, maka untuk file lengkap dapat di unduh pada link berikut : https://drive.google.com/drive/folders/1ueK65j0E8fM9IloG0WbQJ-AyqjH21XdW?usp=sharing Telah dilakukan pelatihan budaya kerja dan pola pikir pada Pengadilan Negeri Curup; Dokumen berupa Sosialisasi Pelayanan Prima, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penerapan Budaya Kerja, Daftar Hadir Seluruh Hakim dan Pegawai, Program Reward dan Punishment.
	Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM?	A	1		dikarenan file e-doc melebihi batas maksimal upload, maka untuk file lengkap dapat di unduh pada link berikut : https://drive.google.com/drive/folders/1o3KtKJLf mDgxYX9t9ygrOwn8bApFKQsK?usp=sharing Semua anggota telah terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan usulan-usulan dari anggota diakomodasikan dalam keputusan; dokumen berupa : dokumen penandatanganan pakta integritas, Perjanjian kinerja dan komitmen bersama, Laporan Hasil Pembangunan ZI, Dokumen Pembangunan ZI, Rapat Penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja ZI
II.	PENATAAN TATALAKSANA	7	7	100,00%	
	Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama				
	1 (2)	2	2	100,00%	
	Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi	A	1		Dikarenakan file e-doc melebihi batas maksimal upload, maka untuk dokumen lengkap di link berikut : https://drive.google.com/drive/folders/1wVum3MUdcCPSelIczIvIU_UvPyRX28Ee?usp=sharing Dokumen pendukung berupa : 1. Pemetaan proses bisnis, 2. SK pemberlakuan SOP, 3. SOP Pengadilan Negeri Curup, dan 4. SOP Inovasi pada Pengadilan Negeri Curup. TINDAK LANJUT HASIL PERBAIKAN : Peta Proses Bisnis
	Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan	A	1		Unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi dan juga melakukan inovasi pada SOP yang diterapkan; DATA PENDUKUNG BERUPA : 1. CAPTURE ALUR ATAU PROSEDUR PIDANA, 2. GUGATAN SEDERHANA, BANTUAN HUKUM, UMUM KEUANGAN, JURUSITA PANITERA PENGGANTI, SEKRETARRIS, KEPEGAWAIAN, CAPTURE PEMASANGAN INFORMASI, DAN 3. FOTO KEGIATAN LAYANAN 2021. TINDAK LANJUT HASIL PERBAIKAN : SOP Kepaniteraan dan SOP Kesekretariatan yang telah disahkan oleh Wakil Ketua PN Curup Dokumen dapat diunduh pada link berikut : https://drive.google.com/drive/folders/1DjF_1-DsphBSx0p1uekG8sPCUqmE_5z3?usp=sharing

Dikarenakan file e-doc melebihi batas maksimal upload, maka untuk dokumen lengkap di link berikut :
<https://drive.google.com/drive/folders/1rHeJYEpMfyzMpDgJpSFpoW7ojBV2Op3Y?usp=sharing>
 Seluruh SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP. Data Pendukung : Dokumen Hasil Evaluasi SOP dan Sosialisasi SOP

	c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi	A	1	
2	E-Office (4)	4	4	100,00%
	Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi?	A	1	Unit telah memiliki sistem pengukuran kinerja yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi. Data pendukung : 1. Inovasi Pengukuran Kinerja secara Eksternal melalui aplikasi E-IKM, E-IPK, 2. Survei E-Pelayanan PTSP, 3. Pengukuran Kinerja Satker Melalui Aplikasi SIPP, MIS, SIKEP dan 4. Capture Inovasi.
	Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi?	A	1	Unit telah memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi. Data pendukung : 1. Capture Manajemen SDM melalui Aplikasi SIPP dan SIKEP, 2. CAPTURE MENU MANAJEMEN SDM PADA APLIKASI SIKEP dan 3. CAPTURE KEPANGKATAN DAN JABATAN SIKEP
	Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi?	A	1	Unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi. Data Pendukung : 1. Capture Website, Aplikasi Layanan, Serta Media Sosial dan 2. Panduan Penerima Tamu
	Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik?	A	1	Laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik telah dilakukan bulanan. Data Pendukung : 1. DOKUMEN RAPAT MONITORING DAN EVALUASI SISTEM PENGUKURAN KINERJA BERBASIS IT DAN 2. LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI SISTEM PENGUKURAN KINERJA BERBASIS IT
3	Keterbukaan Informasi Publik (1)	1	1	100,00%
	a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan	A	1	Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik sudah diterapkan. Data Pendukung : 1. SK PPID sebagai pelaksanaan dari SK KMA 1-144 tahun 2011, 2. SK PENUNJUKAN OPERATOR MEDIA SOSIAL, 3. Capture Spanduk, Banner Website, Media Sosial dan 4. CAPTURE ALUR ATAU PROSEDUR PIDANA, GUGATAN SEDERHANA, BANTUAN HUKUM, UMUM KEUANGAN, JURUSITA PANITERA PENGGANTI, SEKRETARIS, KEPEGAWAIAN.
	b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	A	1	Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik. DOKUMEN PENDUKUNG BERUPA : 1. DOKUMEN MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN 2. LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
III.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	10	10	100,00%
	Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai Dengan			
1	Kebutuhan Organisasi (0,5)	0,5	0,5	100,00%

<p>a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan?</p>	YA	1	<p>Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja sudah mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan. Dikarenakan dokumen melebihi batas maksimal upload maka untuk dokumen lengkap dapat di unduh pada link berikut : (https://drive.google.com/drive/folders/1oij9mGAWq2zUf0SB84d0zA-aE__cmPKD?usp=sharing) Data Dukung : 1. Dokumen Rapat ABK, 2. Dokumen Analisis Beban Kerja dan Kebutuhan Pegawai, 3. Dokumen Usulan Analisis Beban Kerja dan Kebutuhan Pegawai</p>
<p>b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan?</p>	A	1	<p>Semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni telah mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan. Data Dukung : 1. Dokumen Rekrutmen PPNPM, 2. SK PPNPM dan 3. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas PPNPM</p>
<p>c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja?</p>	YA	1	<p>Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja. Data Dukung : Dokumen berupa Monitoring dan Evaluasi Penilaian Kinerja PPNPM</p>
<p>2 Pola Mutasi Internal (1) 1 1 100,00%</p>			
<p>a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan?</p>	YA	1	<p>telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari pengembangan karier pegawai. Data Pendukung : 1. Dokumen BAPERJAKAT, 2. SK Mutasi Internal dan 3. Usulan Baperjakat serta Daftar Riwayat Pekerjaan Pegawai bersangkutan</p>
<p>b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan?</p>	A	1	<p>Semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi dan juga unit kerja memberikan pertimbangan terkait hal ini; Data Pendukung : 1. Data berupa Dokumen Rapat Mutasi Internal, 2. SK Mutasi dan 3. DRH Pegawai bersangkutan</p>
<p>c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?</p>	YA	1	<p>Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja. Data Pendukung : Hasil dari Penilaian Monitoring dan Evaluasi terhadap Kegiatan Mutasi yaitu Nilai 1 = ada Peningkatan (Efektif)</p>
<p>3 Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi (2,5) 2,5 2,5 100,00%</p>			
<p>a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi ?</p>	YA	1	<p>Sudah dilakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi. Data Pendukung : 1. Dokumen Analisis Pengembangan Kompetensi, 2. Satker Melakukan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tahun 2021, 3. Dokumen Sosialisasi Pelayanan Prima (Pelatihan untuk peningkatan kompetensi Petugas PTSP), dan 4. Dokumen Usulan Diklat Online Pada Pengadilan Negeri Curup Tahun 2021. TINDAK LANJUT HASIL PERBAIKAN : TNA Perorang</p>

b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai?	A	1	Semua rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai. Data Pendukung berupa : 1. Dokumen Sosialisasi Pelayanan Prima (Pelatihan untuk peningkatan kompetensi Petugas PTSP), dan 2. Dokumen Usulan Diklat Online Pada Pengadilan Negeri Curup Tahun 2021. TINDAK LANJUT HASIL PERBAIKAN : Bimtek
c. Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan	A	1	Pengembangan Kompetensi Persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar <25%. TINDAK LANJUT HASIL PERBAIKAN : Dokumen berupa Laporan pengukuran persentase kesenjangan kompetensi pegawai perorang (PNS)
d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.	A	1	Seluruh pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya. Data Pendukung : Para Pegawai pada Satker Pengadilan Negeri Curup mengikuti beberapa kegiatan Diklat maupun Bimtek yang diselenggarakan oleh beberapa Instansi
e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll) ?	A	1	Unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai. Data Pendukung : Dokumen pengembangan Kompetensi pada Pengadilan Negeri Curup. TINDAK LANJUT HASIL PERBAIKAN : Pelatihan Penyusunan Anggaran
f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?	A	1	Laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan bulanan. TINDAK LANJUT HASIL PERBAIKAN : Monev berupa sosialisasi hasil Bimtek.
4 Penetapan Kinerja Individu (4)	4	4	100,00%
a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	A	1	Seluruh penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi. Data Pendukung : 1. Dokumen rapat pembahasan penilaian SKP, 2. SKP Pegawai dan 3. Perjanjian Kinerja Pegawai
b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya	A	1	Seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya . Data Pendukung : Dokumen berupa SKP. TINDAK LANJUT HASIL PERBAIKAN : SKP atas nama Ahmades (panitera) Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan. Data Pendukung : Dokumen Pengukuran Kinerja Individu Bulan Januari Thaum 2021 pada Pengadilan Negeri Curup
c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	A	1	Hasil penilaian kinerja individu seluruhnya dijadikan dasar pemberian reward. Data Pendukung : 1. Dokumen Laporan Pemilihan Role Model, 2. Dokumen Laporan Pemilihan Agen Perubahan, 3. Dokumen Laporan Pemilihan Pegawai terbaik, 4. SK Role Model. 5. SK Agen Perubahan, 6. SK Pegawai Terbaik. 7. Piagam Penghargaan Role Model, 8. Piagam Penghargaan Agen Perubahan dan 9. Piagam Penghargaan Pegawai Terbaik. TINDAK LANJUT HASIL PERBAIKAN : penilaian kinerja telah dijadikan dasar pemberian reward
d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll).	YA	1	

Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku					
5	Pegawai (1,5)	1,5	1,5	100,00%	
	a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan	A	1		Unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja. Data Pendukung : Dokumen Sosialisasi Kode Etik Hakim, Panitera, Juru Sita Dan Aparatur Sipil Negara, Dokumen Pemotongan Remunerasi terkait kehadiran pegawai. Dokumen Inovasi implementasi disiplin kerja pada Pengadilan Negeri Curup (SK Role Model, Sk Agen Perubahan, SK Pegawai Terbaik, SK Petugas PTSP Terbaik, Piagam Penghargaan Role Model, Piagam Penghargaan Agen Perubahan, Piagam Penghargaan Pegawai Terbaik dan Piagam Penghargaan Petugas PTSP Terbaik.
6	Sistem Informasi Kepegawaian (0,5)	0,5	0,5	100,00%	
	a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala.	A	1		Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara bulanan. Data Pendukung : Dokumen berupa Capture Fitur pada Aplikasi Sikep. TINDAK LANJUT HASIL PERBAIKAN : capture SIKEP yang menunjukkan penginputan data sudah 100%.
IV.	PENGUATAN AKUNTABILITAS	10	10	100,00%	
1	Keterlibatan Pimpinan (5)	5	5	100,00%	
	a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan	A	1		Pimpinan telah terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan. Data Pendukung : 1. RAPAT PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN ANGGARAN, 2. DOKUMEN PERENCANAAN KEGIATAN (RENSTRA TAHUN 2020-2024), 3. DOKUMEN PERENCANAAN ANGGARAN (RKAKL TA 2022)
	b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja	A	1		Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja. data dukung berupa : 1. Rapat Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, 2. Dokumen Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Curup Tahun 2021 Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala. data pendukung : 1. RAPAT PEMANTAUAN KINERJA SECARA BULAN FEBRUARI TAHUN 2021, 2. DOKUMEN PEMANTAUAN KINERJA BULAN FEBRUARI TAHUN 2021
	c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	A	1		
2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5)	5	5	100,00%	
	a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada	YA	1		Unit kerja telah memiliki seluruh dokumen perencanaan (Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja); Data Pendukung berupa : DOKUMEN RENCANA STRATEGIS 2020-2024, RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2021, PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021 DAN RENCANA AKSI TAHUN 2021 seluruh dokumen perencanaan telah berorientasi hasil. Data Pendukung berupa : LKJIP TAHUN 2020, PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 DAN RENCANA KERJA TAHUNAN TAMBAHAN TAHUN 2020
	b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil	YA	1		

	c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)	YA	1	Unit kerja memiliki IKU yang ditetapkan organisasi dan juga membuat IKU tambahan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja, Data Pendukung : SK TIM REVIU IKU, SK PENETAPAN IKU, DOKUMEN IKU DAN IKU TAMBAHAN PN CURUP
	d. Apakah indikator kinerja telah SMART (Specifik, Measureable, Achievable, Relevant and Time)	A	1	Seurun indikator kinerja unit kerja telah SMART. Data Pendukung : 1. DOKUMEN IKU TAMBAHAN, 2. LAPORAN HASIL EVALUASI LKJIP OLEH PENGADILAN TINNGI BENGKULU, 3. SK TIM EVALUASI SAKIP, 4. RAPAT MONITORING DAN EVALUASI SAKIP
	e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu	YA	1	Unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu. Dengan Data Dukung : DOKUMEN PENGIRIMAN LKJIP (EKSPEDISI) TAHUN 2021
	f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	A	1	Seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja. Data Dukung Berupa : 1. LAPORAN HASIL EVALUASI LKJIP OLEH PENGADILAN TINNGI BENGKULU, 2. SK TIM PENYUSUN LKJIP, 3. DOKUMEN LKJIP PN CURUP, 4. DOKUMEN MONEV LKJIP PN CURUP
	g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	YA	1	Unit kerja berupaya meningkatkan seluruh kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja dengan sosialisasi. data dukung : 1. DOKUMEN SOSIALISASI LKJIP TAHUN 2021, 2. RAPAT PENYUSUNAN SAKIP, 3. DOKUMEN USUSLAN DIKLAT ONLINE. TINDAK LANJUT HASIL PERBAIKAN : USULAN PELATIHAN SAKIP TAHUN ANGGARAN 2021
	h. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten	A	1	Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten. Data Pendukung : SURAT TUGAS PELATIHAN SAKIP DAN SERTIFIKAT PELATIHAN SAKIP
V.	PENGUATAN PENGAWASAN	15	14,37	95,80%
	1. Pengendalian Gratifikasi (3)	3	3	100,00%
	a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi	A	1	Public campaign telah dilakukan secara berkala. TINDAK LANJUT HASIL PERBAIKAN : Public campaign melalui Media Sosial
	b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan	A	1	Unit kerja mengimplementasikan pengendalian gratifikasi sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengendalian gratifikasi yang sesuai dengan karakteristik unit kerja. Data Dukung berupa : 1. SK WKPN tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi dan lampirannya; 2. SK WKPN tentang Tim Pengendali Gratifikasi dan lampirannya; 3. SK WKPN tentang Himbauan Peringatan perilaku anti Gratifikas dan lampirannya; 4. Screenshot foto CCTV di PTSP, Ruang Sidang Utama, Area Parkir Belakang, Ruang Umum dan Keuangan, Ruang tunggu Pengunjung, Ruang Arsip Perkara Pidana, Ruang Sidang II, Ruang Sidang I, Ruang Sidang Anak, Ruang sidang Utama, PTSP, Lantai II ruang Hakim dan Ketua, Area Parkir depan I dan II. 5 Screenshot Ruang Tunggu Terbuka Pengunjung. 6. Laporan Bulanan Penanganan Gratifikasi. 7. Monitoring dan Evaluasi Penanganan Gratifikasi. 8. Sosialisasi Anti Gratifikasi 9. Sosialisasi Zona Integritas

2 Penerapan SPIP (3)	3	2,75	91,75%	
				Unit kerja telah membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi. Data Pendukung : 1. dokumentasi penerapan Kebijakan PTSP dan acces terbatas. 2. dokumentasi penerapan kebijakan penegakan etik dan integritas serta komitmen pimpinan dan pegawai atas integritas, 3. dokumentasi penerapan kebijakan internal terkait kedisiplinan. 4. Sosialisasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) 5. Sosialisasi Kode Etik. 6. SK WKPN tentang pembentukan satuan tugas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah 7. SK WKPN tentang Manajemen Resiko.
a. a. Telah dibangun lingkungan pengendalian	B	0,67		Unit kerja melakukan penilaian risiko atas seirun pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi. Data Pendukung : 1. dokumen matrik identifikasi risiko 2. dokumen analisis risiko. 3. Form Identifikasi Risiko. 4. Form Level Risiko
b. b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	A	1		Unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi. Data Pendukung : Dokumen laporan pengendalian untuk meminimalisir risiko, Simulasi Tanggap Darurat Kebakaran dan SOP Penanggulangan Risiko Kebakaran
c. c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	A	1		
d. d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	A	1		SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait. Data Pendukung : 1. Dokumen inspeksi mendadak oleh pimpinan 2. Dokumen pelaksanaan apel. TINDAK LANJUT HASIL PERBAIKAN : sosialisasi SPI kepada seluruh pegawai dan stakeholder
3 Pengaduan Masyarakat (3)	3	3	100,00%	
a. a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	A	1		Unit kerja telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi. Data Pendukung : 1. SK tentang Penanganan Pengaduan. 2. Capture sarana Penyampaian pengaduan 3. Capture sarana pengaduan melalui online.n 4. Capture Petugas, Loket kotak pengaduan. TINDAK LANJUT HASIL PERBAIKAN : SK Petugas Meja Pengaduan seirun nasii penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti oleh unit kerja. Data Pendukung : 1. capture SIWAS 2. capture login meja pengaduan 3. capture daftar pelaporan. TINDAK LANJUT HASIL PERBAIKAN : capture SIWAS akun ketua
b. b. Penanganan Pengaduan Masyarakat	100	1		
c. c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	A	1		Monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan bulanan. Data pendukung : 1. Laporan bulanan pengaduan masyarakat. TINDAK LANJUT HASIL PERBAIKAN : Monev pengaduan masyarakat.
d. d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	A	1		Seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti oleh unit kerja. Data Pendukung : tindak lanjut monev pengaduan masyarakat
4 Whistle-Blowing System (3)	3	2,62	87,50%	

	a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi ?	YA	1	Whistle Blowing System telah di internalisasi di unit kerja. Data Pendukung : Laporan bulanan Whistle Blowing System, SK Tentang Whistle Blowing System. TINDAK LANJUT HASIL PERBAIKAN : Internalisasi Pengendalian WBS (Sosialisasi WBS)
	b. Whistle Blowing System telah diterapkan	B	0,5	Unit kerja menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi. Data Pendukung : Capture SIWAS, Capture login siwas sebagai meja pengaduan, Capture daftar pelapor SIWAS, Capture daftar laporan, Banner SIWAS
	c. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System	A	1	Evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan bulanan. Data Pendukung : laporan bulanan WBS
	d. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti	A	1	Seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja. Data Pendukung : Laporan Monitoring dan evaluasi Whistle Blowing System dan Laporan Tindak lanjut Monitoring dan evaluasi Whistle Blowing System
5	Penanganan Benturan Kepentingan (3)	3	3	100,00%
	a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	A	1	Unit kerja telah mengidentifikasi/memetakan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama. Data Pendukung : SK WKPN tentang benturan kepentingan dan dokumen identifikasi/pemetaan benturan kepentingan
	b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi	A	1	Penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan/diinternalisasikan ke seluruh unit kerja. Data Pendukung : Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan
	c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	A	1	Penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke seluruh unit kerja. Data Pendukung : 1. Evidence Implementasi 2. Implementasi penanganan benturan kepentingan.
	d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	A	1	Penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara berkala oleh unit kerja. TINDAK LANJUT HASIL PERBAIKAN : Monitoring dan Evaluasi benturan kepentingan yang sudah diperbaiki
	e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	A	1	Seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja. Data Pendukung : Hasil Evaluasi dan tindak Lanjut benturan kepentingan
6	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan pegawai	0	0	0 %
	a. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	B		Jumlah yang wajib melaporkan LHKPN Tahun 2020 yaitu sebanyak 15 Orang. Untuk yang sudah melaporkan LHKPN tahun 2020 yaitu sebanyak 15 orang, yang belum melaporkan sebanyak 0 Orang.
	b. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	B		Jumlah yang wajib melaporkan LHKASN tahun 2020 pada Pengadilan Negeri Curup yaitu sebanyak 8 Orang. Untuk yang sudah melaporkan LHKASN tahun 2020 sebanyak 8 orang, sedangkan yang belum melaporkan sebanyak 0 orang.
VI.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	10	10	100,00%
1	Standar Pelayanan (3)	3	3	100,00%

				<p>dikarenakan file e-doc melebihi batas maksimal upload, maka file lengkap dapat di unduh pada link berikut : https://drive.google.com/drive/folders/1BvLAEW7BEr0E-I10rg5RmkkUMRFjUyA_?usp=sharing Unit kerja memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja. Data Dukung : SK KMA no 1-144 tahun 2011, SK KMA No 026 tahun 2012, SK DIRJEN BADILUM No 1586 Tahun 2015, SK DIRJEN BADILUM no 77 Tahun 2018, SK KPN No 231 Tahun 2018, SK pedoman standar pelayanan, SK pembentukan struktur, ruang lingkup dan petugas PTSP, SK Tim Kerja WBK WBBM, SK pengawas ptsp, SK Tim Pengelola Ecourt</p>
a.	a. Terdapat kebijakan standar pelayanan	A	1	
				<p>dikarenakan file e-doc melebihi batas maksimal upload, maka file lengkap dapat di unduh pada link berikut : https://drive.google.com/drive/folders/1_cIKhjK9PvqXivsJcCa9WEQA3BGB-4It?usp=sharing Unit kerja telah memaklumkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait maklumat standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja. Data Dukung : Capture Maklumat Pelayanan PN Curup dan Capture Pemasangan Maklumat Standar Pelayanan ditempat Pelayanan Unit kerja telah menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait SOP yang sesuai dengan karakteristik unit kerja. Data Pendukung : SOP PTSP</p>
b.	b. Standar pelayanan telah dimaklumkan	A	1	
c.	c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan	A	1	
				<p>Unit kerja telah melakukan reuiu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga unit kerja berinisiatif melakukan reuiu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP. Data Dukung : 1. sosialisasi SOP, 2. Rapat Reuiu SOP, 3. Laporan Reuiu SOP, 4. Rapat Monev SOP,</p>
d.	d. Dilakukan reuiu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP	A	1	
2	Budaya Pelayanan Prima (4)	4	4	100,00%
				<p>Seluruh sosilisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima. Data Pendukung : Sosialisasi Pelayanan Prima pada Pengadilan Negeri Curup Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media. Data Pendukung : Capture sarana informasi pelayanan</p>
a.	a. Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima	A	1	
b.	b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	A	1	

					upload, maka file lengkap dapat di unduh pada link berikut : https://drive.google.com/drive/folders/15byKOLBEpKQFlixHURAA3XLGoyHJDAuw4?usp=sharing Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan. Data Pendukung : 1. Dokumen Reward,punishment dan kompensasi. 2. Dokumentasi Reward,punishment dan kompensasi. 3. Kompensasi kepada penerima layanan Seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu. Data Pendukung : Capture aplikasi layanan terpadu dan PTSP
	c. Telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	A	1		
	d. Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	A	1		
	e. e. Terdapat inovasi pelayanan	A	1		Unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang seluruhnya berbeda dengan unit kerja lain. Data Pendukung : 1. Capture inovasi pada pelayanan, 2. E-Court, 3. brosur inovasi pelayanan PN Curup
3	Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan (3)	3	3	100,00%	
					dikarenakan file e-doc melebihi batas maksimal upload, maka file lengkap dapat di unduh pada link berikut : https://drive.google.com/drive/folders/1SqAYo4O_gO90qjgAmcy_kTbgVrvQZMvT?usp=sharing Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan secara berkala. Data Dukung : 1. SK TIM IKM TAHUN 2020 dan 2021, 2. Laporan IKM Semester I dan Semester II Tahun 2020, 3. SK TIM IPK TAHUN 2020 dan 2021, 4. LAPORAN IPK Semester I dan Semester II Tahun 2020. TINDAK LANJUT HASIL PERBAIKAN : SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT DAN SURVEY INDEKS PERSEPSI KORUPSI PERIODE SEBELUMNYA (PERIODE SEMESTER I TAHUN 2020) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui berbagai media. Data Dukung : Capture hasil survei kepuasan masyarakat yang dipublikasikan pada website Pengadilan Negeri Curup Periode Semester I dan Semester II Tahun 2020
	a. Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	A	1		
	b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	A	1		
	c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat	A	1		Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasan masyarakat. Data Dukung : 1. LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI IKM SEMESTER I DAN SEMESTER II Tahun 2020. 2. TINDAK LANJUT IKM SEMESTER I DAN SEMESTER II TAHUN 2020. 3. LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI IPK SEMESTER I DAN SEMESTER II TAHUN 2020. 4. TINDAK LANJUT IPK SEMESTER I DAN SEMESTER II TAHUN 2020.
TOTAL PENGUNGKIT		60	59,37	98,95%	
B. HASIL (40)		40	37,2	93,00%	
01.00 PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (20)		20	18,95	94,75%	
	a. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (15)	15	3,72	13,95	93,00% DOKUMEN INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) PENGADILAN NEGERI CURUP PERIODE JULI-DESEMBER TAHUN 2020

dikarenakan file e-doc melebihi batas maksimal upload maka untuk dokumen lengkap dapat diunduh di link :
<https://drive.google.com/drive/folders/1eGgCaKSGT6vDUXnn6YXNxpIzdvd1L6I?usp=sharing>
 Semua Temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) pada Pengadilan Negeri Curup sudah ditindaklanjuti. Dokumen pendukung berupa : 1. Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan PT Bengkulu Pada Pengadilan Negeri Curup tahun 2020, 2. Laporan Tindak Lanjut Assessment APM ke Tiga oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu pada Pengadilan Negeri Curup tahun 2020, 3. Laporan Tindak Lanjut hasil audit internal pada Pengadilan Negeri Curup.

Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti (5)	5	100	5	100,00%	
02.00 KUALITAS PELAYANAN PUBLIK(20)	20		18,25	91,25%	
Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)					
a. (20)	20	3,65	18,25	91,25%	Laporan IKM Periode (Juli-Desember Tahun 2020)
TOTAL HASIL	40		37,2	93,00%	
Nilai Pembangunan ZI	100		96,57	96,57%	